

**PROGRAM PEMBERDAYAAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN NELAYAN
DI DESA BUNONG KECAMATAN BINTAUNA KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW UTARA**

FRILIA FEREN WATUNG

MARTHA OGOTAN

ALDEN LALOMA

Email : Friliawatung@gmail.com

***Abstract:** This study aims to find out about the empowerment program in increasing the income of fishermen in Bunong Village, Bintauna Subdistrict, Bolaang Mongondow North Regency. This type of research used in this research is qualitative descriptive research type. All data presented is in accordance with primary and secondary data. Data collection techniques based on observation, interviews and documentation, data obtained from various sources analyzed and made a conclusion. The problem in this study lies in the level of income and welfare of fishermen to the inability to utilize the potential of marine resources owned by Indonesia. The findings of this study indicate that the empowerment program in increasing the income of fishermen in Bunong Village, Bintaunan Sub-district, Bolaang Mongondow North Regency is seen from the research indicators namely enabling, empowering, and protecting can increase the income of fishermen by encouraging the work spirit of fishermen through activities and assistance from empowerment programs such as capital assistance, outreach, work equipment and motivation assistance, as well as workforce and facility training. The village government needs to collaborate more with the Maritime Affairs and Fisheries Office in conducting socialization and training of workers in increasing the income of fishermen in Bunong Village, Bintaunan Subdistrict, Bolaang Mongondow North Regency.*

Keywords : *Empowerment Program, enhancement, income, fisherman*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara Kepulauan yang memiliki 17.508 pulau besar dan kecil. Dari 17.508 pulau yang ada, 16.056 pulau kecil dan besar diantaranya telah secara resmi diakui oleh PBB (*Persatuan Bangsa-Bangsa*). Pulau-pulau tersebut yang sebagian besar wilayahnya berupa wilayah perairan atau laut mencapai 5,8 juta km² atau 75,5% dari luas total wilayah Indonesia dan memiliki panjang garis pantai /pesisir pantai lebih dari 99.093 km². Dengan keadaan seperti ini, maka Indonesia disebut sebagai Negara Maritim. Sebagai salah satu Negara yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan dengan luas laut Indonesia 2,5 kali lipat dari wilayah daratan pastinya memiliki potensi yang sangat besar, baik dari segi kekayaan alam maupun jasa lingkungan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembangunan ekonomi pada tingkat lokal, regional, dan nasional.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan sumber daya alam dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan

dengan sebaik-baiknya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan pada pasal 1 ayat 1 yaitu pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, antar sektor, antar ekosistem darat dan laut, serta antar ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Wilayah pesisir pantai sejatinya merupakan sebuah kawasan dinamis yang sangat strategis dan berpotensi besar untuk mengembangkan berbagai sektor usaha khususnya di bidang perikanan. Apabila sumber daya kelautan yang ada tersebut dapat dikembangkan secara optimal akan menjadi potensi ekonomi yang menjanjikan masa depan masyarakat Indonesia. Masyarakat yang tinggal di pesisir pantai biasanya berprofesi sebagai nelayan yang tergantung

dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang diperoleh dari laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Walaupun merupakan kawasan potensial, namun pendapatan nelayan tergolong rendah (Imron, 2003).

Sumber daya perikanan sebenarnya secara potensial dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, namun yang menjadi permasalahan, masih banyak nelayan yang belum dapat meningkatkan hasil tangkapannya, sehingga tingkat pendapatan nelayan tidak meningkat. Hal ini terjadi karena penghasilan mereka masih tergantung pada kondisi alam, maka sulit bagi mereka untuk merubah kehidupannya menjadi lebih baik. Wahyono (2001) dan Kusnadi (2007) mengatakkan bahwa pendapatan usaha tangkap nelayan sangat berbeda dengan jenis usaha lainnya, seperti pedagang atau bahkan petani. Jika pedagang dapat mengkalkulasikan keuntungan yang diperoleh setiap bulannya, begitu pula petani dapat memprediksi hasil panennya, maka tidak demikian dengan nelayan yang kegiatannya penuh dengan ketidak pastian (*uncertainty*). Rendahnya pendapatan nelayan juga mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat nelayan itu sendiri.

Kesejahteraan nelayan yang rendah akibat dari rendahnya pendapatan mereka merupakan permasalahan yang sering terjadi, terutama pada nelayan tradisional. Nelayan tradisional merupakan nelayan yang masih memanfaatkan sumber daya perikanan dengan peralatan tangkap tradisional, modal usaha yang kecil, dan organisasi penangkapan yang relatif sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari, nelayan tradisional lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sendiri (*subsistence*). Dalam arti, hasil penangkapan sebagian besar digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dibandingkan untuk diperdagangkan. Selain itu keterbatasan pengetahuan nelayan tradisional dalam mengelola hasil tangkapan menjadi permasalahan dimana hasil tangkapan nelayan

berupa ikan memiliki jangka waktu tertentu untuk dijual atau didagangkan.

Pemerintah sendiri, sebetulnya bukan tidak memahami kondisi dan tekanan perekonomian yang dialami oleh masyarakat daerah pesisir, khususnya nelayan tradisional. Pemerintah telah berupaya membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan maupun kesejahteraan masyarakat nelayan dengan adanya program-program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan (*skill*), perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat nelayan sendiri merupakan sebuah konsep yang dikembangkan untuk memperkuat kemandirian masyarakat nelayan. Dimana pemberdayaan masyarakat nelayan meliputi peningkatan pengetahuan serta kemampuan nelayan, lewat sosialisasi, pelatihan, pengembangan komunikasi, koordinasi serta pembinaan melalui dukungan lewat motivasi dan pemberian fasilitas.

Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidayaan Ikan Kecil pasal 3 dan pasal 4 menjelaskan mengenai pemberian fasilitas oleh pemerintah melalui program pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat nelayan merupakan tantangan mengingat banyaknya permasalahan yang perlu diperbaiki dan mengingat kemungkinan adanya sumber daya alam yang besar yang berasal dari laut untuk perkembangan perekonomian masyarakat maupun perkembangan perekonomian suatu daerah atau desa.

Desa Bunong merupakan salah satu desa yang berada di kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Desa

Bunong terletak cukup dekat dengan laut dimana hal ini juga yang menjadikan sebagian besar masyarakat desa Bunong bekerja sebagai nelayan. Entah menjadikan nelayan sebagai pekerjaan utama ataupun pekerjaan sampingan. Walaupun letak desa Bunong berada dekat dengan pantai/laut dan sebagian besar masyarakat bekerja sebagai nelayan, tetapi hal ini tidak membuat kualitas hidup nelayan di desa Bunong meningkat.

Keadaan hidup yang pas-pasan dan bahkan harus bergantung dengan pekerjaan lain, membuktikan rendahnya kesejahteraan maupun pendapatan para nelayan. Padahal letak desa Bunong yang berada dekat dengan laut ini bisa dimanfaatkan dan dikelola secara maksimal bagi masyarakat disana terlebih lagi bagi para nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Permasalahan kemiskinan atau rendahnya pendapatan nelayan ini juga disebabkan karena masyarakat nelayan yang pencariannya hanya untuk sehari-hari. Tetapi hal ini juga disebabkan oleh modal usaha para nelayan yang kecil hingga menyebabkan para nelayan kesulitan untuk membeli alat tangkap melaut yang bisa dibilang cukup mahal dan mengharuskan beberapa nelayan untuk meminjam perahu maupun alat tangkap ikan untuk melaut dari nelayan lain.

Selain itu, alat tangkap melaut para nelayan yang masih dapat dikatakan tradisional tidak memungkinkan para nelayan untuk bertahan lama dilaut dan memanfaatkan sumber daya alam dari laut secara maksimal. Kondisi ini juga diperburuk dengan kurangnya pengetahuan dan kemampuan para nelayan dalam mengelolah hasil tangkapan dan terbatasnya ruang dalam menjual hasil tangkapan mereka ditempat lain. Dengan berbagai permasalahan yang ada hingga menyebabkan kesulitan bagi para nelayan untuk mengembangkan maupun meningkatkan pendapatan mereka.

Adapun beberapa program pemberdayaan masyarakat yang telah berjalan di desa Bunong sejak beberapa tahun terakhir. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan di desa Bunong nyatanya telah

dilaksanakan tetapi belum memberikan hasil yang positif. Dari program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan seperti pemberian modal, sosialisasi, pelatihan dan sebagainya, masih ditemukan adanya nelayan yang kesulitan dalam melaut dikarenakan tidak adanya perahu maupun alat melaut yang tidak memadai. Selain itu, permasalahan mengenai penjualan hasil tangkap nelayan seperti harga ikan yang rendah dan terbatasnya dalam pemasaran, memberi kerugian modal pada para nelayan dan kemampuan nelayan dalam mengelola hasil laut yang masih kurang. Permasalahan mengenai nelayan seperti ini masih sering ditemui di daerah pesisir pantai maupun desa-desa lain. Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka akan merugikan masyarakat terutama yang bekerja sebagai nelayan terlebih lagi daerah atau desa dalam melakukan perkembangan pembangunan.

Dari uraian masalah diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Program Pemberdayaan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan Di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara"

KAJIAN PUSTAKA

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dan berkemampuan terhadap apa yang mereka miliki. Menurut Soemantri (2010:74), pemberdayaan yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya Wasistiono (2003:60) mengatakan pemberdayaan sebagai upaya membuat orang, kelompok atau masyarakat menjadi lebih berdaya, sehingga mampu mengurus kepentingan secara mandiri.

Dari pengertian diatas dapat dimaknai bahwa pemberdayaan merupakan suatu upaya atau usaha untuk menjadikan masyarakat lebih berdaya dari sebelumnya dengan mewujudkan kemampuan dan kemandirian agar mampu mengurus kepentingan sendiri

secara mandiri tanpa tergantung pada orang atau organisasi lain.

Widjaja (2010: 169), mendefinisikan pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara baik dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Dimensi pemberdayaan masyarakat menurut Ginanjar Kartasasmita, 1996 (dalam Femmy Tulus dan Very Londa 2014) menyebutkan tiga dimensi yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting* sebagai berikut ;

1. Menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Memberdayakan mengandung arti pula melindungi (*protecting*). Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh

karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat berdasar sifatnya.

Menurut Raharja dan Manurung (2010:266) bahwa pendapatan merupakan total penerimaan berupa uang maupun bukan uang oleh seseorang atau rumah tangga selama periode tertentu. Dalam bentuk bukan uang yang diterima oleh seseorang misalnya berupa barang, tunjangan beras, dan sebagainya. Penerimaan yang diterima tersebut berasal dari penjualan barang dan jasa yang dihasilkan dalam kegiatan usaha.

Sementara Suroto (2000), pendapatan adalah seluruh penerimaan baik berupa uang maupun berupa barang yang berasal dari pihak lain maupun hasil industri yang dinilai atas dasar sejumlah uang dari harta yang berlaku saat itu. Pendapatan merupakan sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan penghidupan seseorang secara langsung maupun tidak langsung. Dapat dikatakan bahwa pendapatan merupakan penghasilan dari usaha penjualan barang maupun jasa yang dilakukan dalam bentuk uang maupun bukan uang.

Nelayan adalah orang yang hidup dari mata pencaharian hasil laut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nelayan didefinisikan sebagai orang yang mata pencarian utamanya adalah menangkap ikan atau biota dilaut. Secara geografis, masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh, dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan transisi antara wilayah darat dan laut (Kusnadi, 2009:27).

Menurut Imron (2003), nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu riset yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007)

Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan dalam upaya mencapai tujuan penelitian untuk mendeskripsikan program pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan memperoleh data serta fakta yang berhubungan dengan objek dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat nelayan Desa Bunong sebanyak 7 orang nelayan dan juga pemerintah Desa Bunong 1 orang. Fokus penelitian dalam penelitian ini berdasarkan dimensi pemberdayaan menurut Kartasmita (dalam Femmy Tulus dan Very Londa 2014) adalah : (1) *enabling*, mengembangkan potensi masyarakat dengan adanya program pemberdayaan melalui kegiatan-kegiatan seperti pemberian modal, sosialisasi, pemberian peralatan kerja dan motivasi. (2) *empowering*, memperkuat potensi para nelayan dengan adanya program pemberdayaan melalui penambahan pengetahuan, pelatihan tenaga kerja, dan pemberian fasilitas. (3) *protecting*, memberdayakan berarti melindungi dengan adanya peraturan desa mengenai pengelolaan, harga, dan kualitas hasil tangkap melaut para nelayan.

Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono : 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pemberdayaan merupakan salah satu program pemerintah Indonesia untuk membantu masyarakat khususnya pedesaan dalam meningkatkan kualitas hidup. Dimana program pemberdayaan ini juga bertujuan untuk menguatkan usaha, pendapatan, serta lingkungan dan kehidupan masyarakat terutama masyarakat kecil yang rentan akan perubahan jaman. Dalam kenyataannya, nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki tingkat pendapatan terendah dibandingkan pekerjaan lainnya. Padahal potensi yang dimiliki Indonesia akan sumber daya laut cukup besar jika hal ini dikelola dengan baik.

Selain itu, dilihat dari hasil temuan pada penelitian terdahulu yang telah dipilih sebelumnya, yang dilakukan oleh Raldy Dareno (2019) tentang pengaruh pemberdayaan masyarakat nelayan terhadap tingkat pendapatan nelayan di Kelurahan Karekon Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Pada hasil temuan dari penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan. Pemberdayaan masyarakat nelayan dapat dikatakan baik hanya saja masih terdapat kekurangan pada pengawasan dan perlindungan dimana terdapat kesalahpahaman antara nelayan dan oknum penjual (pelelangan) dan menyebabkan kualitas ikan hasil tangkap nelayan menjadi tidak baik hingga menimbulkan kerugian. Selain itu para nelayan di Kelurahan Lembeh Utara Kota Bitung, tidak memiliki capaian target melaut. Hal ini sangat disayangkan jika dibiarkan terus terjadi. Untuk itu pemerintah mengupayakan penguatan pendapatan nelayan dengan adanya program pemberdayaan.

Program pemberdayaan sebagai upaya dalam meningkatkan pendapatan nelayan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan maupun bantuan-bantuan seperti : pemberian atau peminjaman bantuan modal kepada nelayan melalui BUMDes, sosialisasi dalam menambah wawasan pengetahuan nelayan,

pelatihan tenaga kerja, pemberian motivasi serta pemberian bantuan peralatan kerja demi menunjang masyarakat nelayan, pemberian fasilitas dan perlindungan berupa peraturan setempat untuk menghindari terjadinya kerugian dan kecurangan.

Sebagaimana teori pemberdayaan dari Kartasasmita (dalam Femmy Tulus dan Very Londa 2014) menyebutkan tiga dimensi yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat yaitu (1) *enabling*, menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang, (2) *empowering*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat, (3) *protecting*, memberdayakan sekaligus melindungi.

Dilihat dari teori tersebut, pemerintah dalam upaya untuk menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*) dalam hal ini nelayan dengan memberikan bantuan modal. Dengan adanya bantuan modal ini diharapkan dapat mengembangkan usaha para nelayan. Dengan adanya bantuan modal ini memungkinkan para nelayan untuk bisa mengembangkan maupun memperkuat pekerjaan mereka. Nelayan yang tergolong dalam pekerjaan yang memiliki tingkat pendapatan renda cenderung mengalami ketidakberdayaan oleh arus jaman. Dimana peralatan-peralatan yang semakin berkembang juga memiliki harga yang semakin mahal. Oleh sebab itu dengan adanya pemberian bantuan modal ini diharapkan untuk para nelayan bisa mengembangkan usaha yang mereka lakukan. Sebagaimana yang dimaksudkan, pemberian modal juga dilakukan oleh Pemerintah Desa Bunong dalam menungjung sekaligus untuk memperkuat para nelayan. Pemberian bantuan modal tersebut telah terlaksana sebagaimana mestinya. Tetapi pada nyatanya pemberian bantuan modal untuk nelayan ini tidak dijalankan secara merata. Masih cukup banyak nelayan yang tidak mendapatkan pemberian maupun pinjaman bantuan modal ini. Hal ini cukup disayangkan mengingat di Desa Bunong masih ada nelayan kecil yang

membutuhkan bantuan modal dalam mengembangkan pekerjaan mereka. Pemberian atau peminjaman bantuan modal ini tidak terlaksana secara merata dikarenakan kesibukan para nelayan dan juga karena pengurusan administrasi untuk mendapatkan bantuan pinjaman modal ini dianggap cukup sulit dan membingungkan. Selain itu para nelayan yang mengurus administrasi pengajuan bantuan modal belum tentu akan mendapatkannya. Padahal yang semestinya terjadi, pemberian atau peminjaman bantuan modal itu harus dilakukan secara merata dan tidak menyulitkan para nelayan. Akan sangat disayangkan jika para nelayan tidak mengembangkan potensi maupun usaha mereka mengingat potensi yang dimiliki Indonesi dengan sumber daya laut yang begitu melimpah.

Kegiatan sosialisasi juga dilakukan dalam rangka menambah wawasan nelayan. Pemerintah Desa Bunong menjadikan sosialisasi sebagai salah satu kegiatan dalam program pemberdayaan. Dalam menyelenggarakan sosialisasi, Pemerintah Desa Bunong bekerja sama dengan Dinas instansi terkait dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Boroiko mengenai penyuluhan Undnag-Undnag terkait nelayan dan kelautan. Ada juga kerja sama antara pemerintah Desa Bunong dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam memberikan sosialisasi mengenai batas perairan. Sosialisasi yang diberikan sangat bermanfaat bagi para nelayan dalam menambah wawasan pengetahuan seputar aturan-aturan yang perlu diperhatikan saat melaut.

Para nelayan juga merasa sangat terbantu dengan sosialisasi yang diadakan mengingat para nelayan yang berada di Desa Bunong merupakan nelayan kecil dan jauh akan cangkupan informasi sehingga memungkinkan ketidaktahuan nelayan akan perkembangan jaman. Tapi sayangnya, sosialisasi yang dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun ini, bisa dibilang sangat sedikit bahkan jarang dilakukan oleh pemerintah desa. Padahal seharusnya

sosialisasi diadakan minimal 6 bulan sekali. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan, ditambah dari informasi yang didapatkan melalui wawancara, tidak semua nelayan mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Bitung.

Padahal semakin sering sosialisasi diadakan, semakin banyak pula pengetahuan yang bisa didapatkan nelayan untuk mengembangkan potensi mereka. Pemberian bantuan peralatan kerja juga menjadi salah satu bagian dari program pemberdayaan. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong potensi dengan mendorong (*encourage*) semangat kerja para nelayan. Dengan adanya pemberian bantuan peralatan kerja ini membantu para nelayan dalam memenuhi kebutuhan melaut. Selain itu pemberian bantuan ini dapat mendorong semangat kerja nelayan.

Pemberian bantuan peralatan kerja yang diberikan kepada nelayan berupa jaring, motor tempel, boks pendingin (*cool boks*), alat memancing berupa kail dan sinar. Dengan adanya bantuan peralatan kerja bagi para nelayan ini membuat nelayan terdorong untuk lebih semangat bekerja. Dengan adanya dorongan ini, maka dipastikan akan adanya peningkatan produktivitas (hasil) kerja melaut. Selain itu pemberian motivasi bagi para nelayan sekaligus membangkitkan kesadaran (*awareness*) para nelayan dengan adanya potensi akan sumber daya laut Indonesia yang sangat menguntungkan jika dapat dikelola dengan maksimal.

Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*) dengan kegiatan sosialisasi ataupun penyuluhan yang diadakan oleh pemerintah desa dengan bekerjasama Dinas Perikanan dan Kelautan. Sosialisasi yang diadakan untuk para nelayan memberikan masukan pengetahuan mengenai aturan-aturan saat melaut sekaligus hak-hak dan potensi sumber daya laut yang dapat dimanfaatkan oleh para nelayan. Pengetahuan yang didapatkan nelayan dari sosialisasi tersebut memberikan manfaat dalam kegiatan melaut para nelayan. Hanya

saja yang menjadi kekurangan dalam pemberian pengetahuan yaitu pada seberapa paham para nelayan dengan informasi atau pengetahuan yang diberikan.

Akan sangat baik jika nantinya Dinas Kelautan dan Perikanan lebih memperhatikan pemahaman informasi dan cara penyampaian informasi pada para nelayan. Selain sosialisasi juga ada pelatihan yang diberikan pada para nelayan untuk meningkatkan kemampuan melaut. Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah yang lebih positif, selain hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

Pemberian pelatihan tenaga kerja ini dilakukan bukan hanya sebatas untuk memperkuat potensi yang dimiliki nelayan melainkan untuk meningkatkan potensi-potensi tersebut dan sekaligus menambah kemampuan atau *skill* nelayan dalam menangkap ikan juga dalam penggunaan alat tangkap. Pelatihan tenaga kerja tidak hanya terbatas pada tindakan tetapi juga masukan. Dimana pelatihan dilakukan dengan mengajarkan teknik-teknik juga sekaligus memberi masukan (*input*) pada para nelayan akan tindakan yang akan mereka lakukan. Pelatihan tenaga kerja ini terbukti sangat membantu dalam kegiatan melaut para nelayan. Adapun pemberian fasilitas berupa perahu dan bangunan sebagai tempat berkumpul para nelayan sekaligus sebagai tempat penyimpanan alat tangkap ikan/melaut. Pemberian fasilitas oleh pemerintah desa ini lebih mempermudah para nelayan dalam berkomunikasi untuk nelayan lain. Pemberian perahu juga sebagai pendukung dalam kegiatan melaut. Dengan adanya pemberian perahu ini, nelayan yang sebelumnya tidak dapat melaut karena tidak memiliki perahu atau karena perahu yang dimiliki sudah tidak dapat digunakan lagi, bisa melaut.

Dalam melindungi nelayan, Pemerintah Desa Bunong bersama nelayan membuat kesepakatan dalam hal harga dan kualitas penjualan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi nelayan dari kerugian penjualan harga ikan yang tergolong rendah dan menghindarkan para nelayan dari persaingan dengan nelayan lain dalam penjualan ikan. tetapi sangat disayangkan jika tidak ada Perdes untuk melindungi kegiatan nelayan ini.

Program pemberdayaan meningkatkan pendapatan nelayan dengan mengembangkan, memperkuat sekaligus

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Program pemberdayaan dalam meningkatkan pendapatan nelayan di Desa Bunong Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan kegiatan dan bantuan seperti pemberian modal, sosialisasi, pemberian bantuan peralatan kerja dan pemberian motivasi telah terlaksana. Hanya saja pemberian modal dari BUMDes belum dilakukan secara merata, masih ada nelayan yang tidak mendapatkan bantuan modal dikarenakan kesulitan dalam proses administrasi serta kegiatan Sosialisasi hanya dilakukan dua kali dan masih ada nelayan yang tidak dapat mengikuti kegiatan Sosialisasi.
2. Pemberian pengetahuan dan pelatihan tenaga kerja dilakukan melalui kegiatan Sosialisasi. Pemberian fasilitas seperti pemberian perahu dan bantuan bangunan sebagai tempat berkumpul nelayan dilakukan secara merata dan sangat membantu nelayan dalam menjangkau kegiatan melaut.

DAFTAR PUSTAKA

Imron, M. 2003. Kemiskinan Dalam Masyarakat Nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*. 5, 63-82.

melindungi potensi-potensi yang dimiliki masyarakat nelayan. Memungkinkan masyarakat nelayan berkembang dan terbebas dari ketidakberdayaan lewat program-program yang ada. Dengan adanya program pemberdayaan ini sangat membantu masyarakat kecil terlebih nelayan yang rentan akan perkembangan jaman. Mengingat besarnya potensi sumber daya laut yang dimiliki Indonesia, akan sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin.

3. Tidak ada peraturan desa mengenai pengelolaan, penjualan, harga dan kualitas mengenai hasil melaut. Hanya ada kesepakatan bersama antara nelayan dan pemerintah desa mengenai harga dan kualitas dari hasil melaut nelayan.

SARAN

Mengacu pada hasil penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Desa harus lebih banyak mengadakan kerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam mengadakan sosialisasi dan pelatihan tenaga kerja dan mengikutsertakan seluruh nelayan yang ada di Desa Bunong. Selain itu Pemerintah Desa diperlu mempermudah proses administrasi dalam pengajuan pemberian bantuan modal kepada nelayan.
2. Masyarakat nelayan diharapkan bisa lebih menggunakan dan memanfaatkan semua bantuan dan fasilitas yang didapatkan dari program pemberdayaan untuk kegiatan melaut.
3. Diperlukan adanya Peraturan Desa untuk melindungi nelayan dalam kegiatan pengelolaan, penjualan, harga dan kualitas dari hasil melaut nelayan.

Imron, M. 2003. *Pengembangan Ekonomi Nelayan dan Sistem Sosial Budaya*. Jakarta : PT Gramedia.

Kusnadi. 2007. *Jaminan Sosial Nelayan*. Yogyakarta : Pelangi Aksara.

- Kusnadi. 2009. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Moleong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Rahjana, P. dan M. Mandala. 2010. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta : Lembaga Universitas Indonesia.
- Soematri, B. T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedia.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suroto, S. 2000. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Tulus, F. M. G. dan V. Y. Londa. 2014. *Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan Di Desa Lolah II Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*. 1 (1), 92-105.
- Wahyono, A., P. G. I. Antariksa., Imron, M. dan Sudiyono. 2001. *Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*. Yogyakarta : Media Pressindo.
- Wasistiono, S. 2003. *Kapita Selekta, Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bandung : Fokus Media
- Widjaja, H. 2010. *Otonomi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumber Lainnya**
- UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- PP Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidayaan Ikan Kecil.